

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR (SEKOLAH DASAR) DAN PERMASALAHNYA

Rizki Ananda¹, Difva Septira², Putri Nursida Aini³, Adinda Rahmawati⁴

^{1,2,3,4}PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id, ²difvatirra@gmail.com

³putrinursida2@gmail.com, ⁴adindarahmawati00990@gmail.com

ABSTRACT

Financing in basic education, particularly at the primary school level, represents a fundamental component of the national education system. It plays a critical role in enhancing the quality of educational services and promoting equitable access for all segments of the population. Despite the government's efforts to provide various funding mechanisms-such as the Special Allocation Fund (DAK), the School Operational Assistance (BOS), and other financial resources-the implementation of education financing continues to encounter significant challenges. Key issues include disparities in fund distribution between regions, delays in budget disbursement, inadequate transparency and accountability in financial management, and limited managerial capacity at the school level. Additionally, the socio-economic conditions of local communities and the extent of local government involvement significantly influence the effectiveness of fund utilization. Therefore, a comprehensive evaluation of existing financing policies is essential, alongside efforts to strengthen the competencies of school administrators and improve monitoring and oversight systems. These strategic measures are necessary to ensure the realization of a basic education system that is equitable, inclusive, and of high quality on a sustainable basis.

Keywords: *BOS funds, education issues, basic education financing, elementary schools*

ABSTRAK

Pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, merupakan aspek krusial dalam sistem pendidikan nasional. Pembiayaan ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan serta menjamin pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan berbagai sumber dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan lainnya, kenyataannya implementasi pembiayaan pendidikan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain ketidakseimbangan distribusi dana antar wilayah, keterlambatan pencairan anggaran, lemahnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan kurangnya kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, faktor

sosial ekonomi masyarakat serta dukungan aktif dari pemerintah daerah juga sangat memengaruhi sejauh mana dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan yang berjalan saat ini, peningkatan kapasitas pengelola sekolah, serta penguatan sistem pengawasan. Langkah-langkah ini penting agar pendidikan dasar yang merata, adil, dan berkualitas dapat terwujud secara berkesinambungan.

Kata Kunci: dana BOS, masalah pendidikan, pembiayaan pendidikan dasar, sekolah dasar

A. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan guna menciptakan suasana belajar yang mendukung dan kondusif. Proses ini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara maksimal melalui keterlibatan aktif mereka dalam menggali dan mengasah potensi diri yang dimiliki. Pendidikan bertujuan untuk membentuk ketangguhan spiritual, membangun kedisiplinan, menumbuhkan kepribadian yang utuh, mengasah kemampuan berpikir, menanamkan nilai-nilai moral, serta membekali keterampilan hidup yang esensial. Semua ini dilakukan demi kemajuan individu, sekaligus untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Sudarmono et al., 2021)

Pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya. Dengan mendanai tidak hanya orang tetapi pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya beban pemerintah saja, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua serta masyarakat. Apabila pendanaan berasal dari satu pihak, efektivitas penyelenggaraan pendidikan tentu tidak akan berjalan secara optimal. Sebab, Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, diperlukan dukungan pendanaan yang signifikan dan berkelanjutan. (Aflaha et al., 2021)

Analisis biaya pendidikan memiliki beragam manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya memberikan informasi yang relevan dan membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan sekolah

secara lebih efisien dan efektif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Bagi pemerintah, hasil dari analisis ini dapat dijadikan dasar dalam Penyusunan alokasi anggaran pendidikan dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) memiliki peran penting sebagai dasar utama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, langkah strategis yang ditempuh dengan melakukan perbaikan menyeluruh dan terintegrasi terhadap sistem pendidikan.

Di sisi lain, bagi masyarakat, mengetahui rincian biaya yang diperlukan dalam pendidikan dapat menjadi acuan penting ketika melihat pendidikan sebagai investasi masa depan. Pemahaman ini menjadi krusial karena masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa membiayai pendidikan hanya membuang-buang uang tanpa jaminan akan masa depan yang lebih baik

B. Metode Penelitian

Artikel ini dibuat melalui proses pengkajian dan analisis terhadap berbagai pandangan berkembang mengenai persoalan kontroversial,

kondisi yang penuh tantangan, serta kebijakan publik yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur, di mana metode utamanya adalah kajian pustaka yang dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Fokus utama diarahkan pada penelusuran hubungan antar karya ilmiah yang relevan dalam suatu kerangka wacana tertentu, melalui pendekatan yang terstruktur namun tetap lentur dalam penyesuaian konteks.

Seluruh rangkaian metodologi dalam penelitian ini mencakup sejumlah tahap penting, mulai dari pemilihan artikel-artikel yang relevan, pengumpulan data awal dari sumber-sumber kredibel, identifikasi potensi kendala selama proses analisis, hingga pengumpulan informasi pendukung guna memperkuat argumen yang dibangun. Seluruh tahapan dirangkum dalam proses penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menyajikan inti dari hasil kajian secara terstruktur. Selain itu, penyusunan rekomendasi dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut yang bersifat membangun dan dapat diterapkan, berdasarkan analisis

mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang telah ditelaah. Rekomendasi ini diharapkan mampu menjadi panduan atau masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan, pelaku di bidang pendidikan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan mencakup seluruh rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, penggalan, pendistribusian, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pendidikan secara efektif dan efisien. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, adil, dan mudah diakses oleh semua orang. Aturan ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. mengenai Pendanaan Pendidikan Kewajiban dalam mendanai pendidikan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi dari masyarakat. Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang menetapkan

bahwa minimal 20% dari total belanja negara dan belanja daerah dalam APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran dalam bidang pendidikan mencakup dua jenis biaya, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*). (Armawati & Imron Rosadi, 2021).

Biaya langsung mencakup pengeluaran yang secara langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan belajar siswa. Hal ini meliputi pembelian perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar-mengajar, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pembayaran gaji guru. Biaya-biaya tersebut dapat berasal dari pemerintah, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Sementara itu, biaya tidak langsung merujuk pada potensi keuntungan atau penghasilan yang harus dikorbankan oleh siswa selama menjalani masa pendidikan.

Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan mencakup berbagai komponen, termasuk biaya langsung seperti gaji pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, serta biaya operasional lainnya, maupun biaya tidak langsung seperti pengembangan kurikulum dan pelatihan tenaga

pendidik. Pendanaan pendidikan bisa bersumber dari berbagai pihak, antara lain dari pemerintah, partisipasi orang tua atau wali murid, dukungan masyarakat, serta dana yang dialokasikan langsung oleh lembaga pendidikan itu sendiri. (Nadhifa Ardiana Maharani et al., 2024)

2) Kebijakan Standar Pembiayaan

Pada jenjang pendidikan dasar, pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan dalam satu tahun anggaran untuk memastikan pemanfaatannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap arus pendapatan dan pengeluaran guna menjamin penggunaan dana pendidikan secara optimal dalam mewujudkan target yang telah ditentukan. Dalam Bab IX Pasal 62 peraturan tersebut, dijelaskan mengenai standar pembiayaan pendidikan, Termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai pengalokasian dana untuk kegiatan pendidikan dalam satu tahun anggaran. Dana tersebut mencakup pembiayaan untuk investasi, operasional, dan kebutuhan personal. Kajian terhadap pendanaan

pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek pengeluaran, tetapi juga memperhitungkan beragam sumber pendanaan yang tersedia. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengacu pada standar yang berlaku guna memastikan pelaksanaan program pendidikan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Bab IX Pasal 62 memuat penjabaran lengkap mengenai Standar Pembiayaan Pendidikan, dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup seluruh aspek pendanaan dalam sektor pendidikan. Di dalam ketentuan ini diatur berbagai komponen pembiayaan, termasuk investasi modal, biaya operasional, serta partisipasi pembiayaan dari peserta didik. Pembiayaan modal mencakup pengeluaran untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas fisik sekolah, program peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta kebutuhan modal jangka panjang lainnya. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan langsung oleh siswa selama menjalani proses pendidikan turut menjadi bagian dari perhitungan. Adapun biaya operasional meliputi kebutuhan rutin seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran

kewajiban seperti pajak. Seluruh standar pembiayaan ini dirancang agar mampu mencakup berbagai kebutuhan utama dalam pendidikan, baik dari sisi institusi penyelenggara maupun peserta didik, sehingga mendukung tercapainya proses pendidikan yang efektif dan menyeluruh. (Raharjo,2006)

Penyusunan kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada pedoman teknis yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa alokasi dana sekolah dilakukan secara tepat guna dan benar-benar mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap institusi pendidikan diwajibkan mengikuti standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, sekolah tetap diberikan ruang untuk merancang kebijakan internalnya, selama tetap sejalan dengan panduan teknis pengelolaan dana pendidikan yang berlaku.

Petunjuk pelaksanaan BOS, sebagaimana diatur dalam

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, memberikan arahan terperinci mengenai mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana operasional di tingkat sekolah dasar. Dalam regulasi tersebut, besaran dana yang diberikan kepada setiap satuan pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah siswa terdaftar, dengan alokasi sebesar Rp900.000 per siswa per tahun. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan sekolah, seperti biaya administrasi pendaftaran, kegiatan belajar-mengajar, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, serta pembayaran honor bagi tenaga kependidikan non-PNS. Dengan menerapkan kebijakan ini secara konsisten, sekolah diharapkan mengatur pendanaannya secara lebih efisien dan memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. (Margareta & Ismanto, 2017)

3) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sekolah memerlukan dukungan pendanaan yang mencukupi. Standar pembiayaan berfungsi sebagai pedoman yang menetapkan unsur-unsur serta estimasi biaya operasional

untuk setiap jenjang satuan pendidikan dalam satu tahun anggaran. Unsur pembiayaan ini meliputi dana untuk investasi, kebutuhan operasional harian, serta pembiayaan personal. Dengan demikian, diperlukan perencanaan terstruktur secara cermat guna menetapkan sasaran yang hendak dicapai melalui alokasi dana pendidikan. Pembiayaan menjadi krusial karena keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada tercapainya target yang telah ditentukan.

Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran bahwa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, biaya yang dikeluarkan harus proporsional dan sepadan dengan hasil yang diharapkan. Biaya pendidikan memberi ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil tanggung jawab dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 berperan sebagai dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Dalam penyusunan standar pendidikan, pembiayaan dianggap sebagai unsur integral yang tidak dapat dipisahkan. Pembiayaan ini perlu mencakup

berbagai komponen utama, seperti dana investasi, biaya operasional rutin, serta pengeluaran yang menjadi tanggung jawab peserta didik. (Wandra & Hadiyanto, 2021)

4) Kondisi Pembiayaan Pendidikan

Permasalahan di sektor pendidikan, baik sebelum maupun setelah diberlakukannya otonomi daerah, masih menunjukkan kecenderungan yang sama. Salah satu permasalahan mendasar yang hingga kini belum menunjukkan perubahan signifikan keterbatasan fasilitas serta infrastruktur pendidikan yang belum memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal, serta jumlah dan pemerataan tenaga pendidik yang masih belum optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada kurangnya kenyamanan dan efektivitas proses belajarmengajar. Banyak kalangan menilai bahwa kualitas pengelolaan pendidikan dasar di daerah otonom belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus mengalami penurunan. Ironisnya, masih banyak anak usia sekolah dasar yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat tingginya biaya, yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka

pengangguran, tindak kriminal, dan kemiskinan. Keterbatasan pendanaan sektor pendidikan turut memperbesar tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Hingga kini, mekanisme pendanaan pendidikan masih belum sepenuhnya berhasil menjangkau peserta didik dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Di masa mendatang, sistem ini diharapkan dapat disesuaikan guna mendukung upaya mewujudkan. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu penerapan sistem pembiayaan berbasis subsidi silang, dengan prioritas pada peserta didik dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mengakses layanan pendidikan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 52 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban mengimplementasikan

subsidi langsung. Untuk itu, setiap satuan pendidikan perlu merancang dan mengatur mekanisme subsidi ini secara rinci agar tepat sasaran. (Depdiknas, 2008).

D. Kesimpulan

Pendidikan dasar memerlukan dukungan pendanaan yang merata dan kuat untuk menjamin pertumbuhan yang adil serta berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembiayaan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar.

Beberapa di antaranya meliputi ketimpangan alokasi dana antar wilayah, tingginya ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat, disertai rendahnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta kurang efektifnya pengawasan terhadap pengeluaran sektor pendidikan yang kerap tidak selaras dengan kebutuhan yang bersifat prioritas, masih menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi guna mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan ini harus mampu

menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya keuangan, memperkuat sistem evaluasi dan kontrol penggunaan anggaran, mendorong sinergi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap anak di Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, letak geografisnya berkesempatan memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak, berkualitas, dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *Masile =Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59.
- Armawati, A., & Imron Rosadi, K. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Sistem Pendanaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3), 410–417.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i3.432>
- Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195.
<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>
- Nadhifa Ardiana Maharani, Fitri Hidayah, Diki Darmawan, & Syunu Trihantoyo. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.
<https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.04>
- Pendidikan, P. (n.d.). *No Title*.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005>